

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK*
BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA
TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI
DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
YURISTI LAPRIMONI
NIM. E0006256**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK*
BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA
TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI
DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)**

Oleh:

YURISTI LAPRIMONI

NIM. E0006256

**Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Edy Herdyanto, S. H., M. H

NIP. 195706291985031002

Muhammad Rustamaji, S. H., M. H

NIP. 198210082005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK*
BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA
TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI
DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)**

Oleh:

YURISTI LAPRIMONI

NIM. E0006256

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi , S. H., M. Hum
NIP. 195812251986011001 (.....)
Ketua
2. Edy Herdyanto, S. H., M. H
NIP. 195706291985031002 (.....)
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S. H.,M.Hum.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Yuristi Laprimoni

NIM : E0006256

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK* BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan

No.32/Pid.B/2000/PN.Srg) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Yuristi Laprimoni

NIM. E0006256

ABSTRAK

Yuristi Laprimoni, 2010. **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK* BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)”**. Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan terdakwa di persidangan dapat menjadikan alasan atau tidak bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) dan untuk mengetahui implikasi yuridis dengan dikeluarkannya putusan No.32/Pid.B/2000/Pn.Srg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deduksi (deduktif).

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa yang pernah hadir di persidangan, dapat menjadikan alasan bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*). *Kedua*, implikasi yuridis terhadap perkara yang diputus *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima, tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun, namun Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan lagi perkara tersebut dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa sudah ditemukan dan dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci : ketidakhadiran, terdakwa, op tegenspraak, penuntutan.

ABSTRACT

Yuristi Laprimoni, 2010. A JURIDICAL REVIEW ON *OPTEGENSPRAAK* DECISION CONSTITUTING THE PROSECUTION CANNOT BE ACCEPTED BECAUSE THE ACCUSED CANNOT BE PRESENTED ANYMORE IN THE PROCEEDING BY THE PUBLIC PROSECUTOR (Decision No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg). Thesis, Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out whether or not the public prosecutor's incapability of presenting the accused in the proceeding can become the judge's reason to trial the case without the presence of the accused, but the accused is assumed to be present in the proceeding (*op tegenspraak*) and to find out the implication of juridical implication of the decision No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive and applied in nature. The research approach the writer uses in was case, and conceptual approaches. The types and law material sources in this research were primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study, while technique of analyzing data used was deductive analysis technique.

Considering the result of research, it can be concluded that, Firstly, the Public Prosecutor's incapability of presenting the accused that has ever presented in the proceeding becomes the judge's reason to trial the case devoid the accused, but the accused is assumed to be present in the proceeding (*op tegenspraak*). Secondly, the juridical implication of the *op tegenspraak* decision in the form of prosecution rejection, no legal attempt can be filed, but the Public Prosecutor can file anymore the case with the new register number when the accused has been found and can be presented in the proceeding by the Public Prosecutor.

Keywords: Absence, accused, op tegenspraak, prosecution.

MOTTO

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.

(Pengkhotbah 3:11)

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

(Matius 6:33)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.

(1 Petrus 3:10)

Waktu ialah aset berharga yang pasti dimiliki oleh setiap orang dalam hidup ini. Bijaklah mempergunakan waktu, sebab waktu akan terus berputar ke depan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun.

(Penulis)

Jika engkau melihat kesuksesan dalam hidup seseorang, janganlah menginginkan kesuksesannya, melainkan perhatikanlah proses panjang menuju kesuksesan tersebut.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

**Karya kecil ini Penulis persembahkan
teruntuk :**

- 1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamatku, sumber segala
hikmat dan inspirasi;**
- 2. Kedua orangtua Penulis, Bapak Dwi
Tomo, S. H., M. Hum dan Ibu
Suprihatin;**
- 3. Adik-adik Penulis, Takbir
Remalanda, Justitia Resalane, Odisa
Rilasnusa;**
- 4. Sahabat dan teman-teman Penulis;**
- 5. Fakultas Hukum, Persekutuan
Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum
dan almamater Penulis, Universitas
Sebelas Maret Surakarta.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sukacita, dan damai sejahtera, yang telah melimpahkan anugerah dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *OP TEGENSPRAAK* BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)”**. Penulisan hukum ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini adalah bukan semata-mata karena kemampuan Penulis sendiri, tetapi karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S. H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut RH, S. H., M. M, sebagai Pembimbing Akademik Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bimbingan dan motivasi selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Edy Herdyanto, S. H., M. H sebagai Ketua Bagian Hukum Acara sekaligus sebagai dosen pembimbing I, yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Rustamaji, S. H., M. H sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan memberikan banyak masukan serta saran demi kemajuan Penulis dan sempurnanya penulisan hukum ini.
5. Bapak Bambang Santoso, S. H., M. Hum, yang telah membimbing Penulis pada awal penulisan hukum ini yaitu dalam merumuskan judul dan rumusan masalah penulisan hukum ini.
6. Bapak Lego Karjoko, S. H., M. Hum sebagai ketua pengelola penulisan hukum, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk dapat melaksanakan penulisan hukum ini. Juga untuk staf pengelola penulisan hukum, Sdr. Wawan, yang telah memberi bantuan dan penjelasan yang memudahkan Penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum kepada Penulis, semoga bekal ilmu tersebut dapat Penulis gunakan dan amalkan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang.
8. Segenap staf perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi bantuan dan kemudahan bagi Penulis untuk mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan hukum ini.
9. Kedua orangtua Penulis, Bapak Dwi Tomo, S. H., M. Hum dan Ibu Suprihatin, terima kasih untuk doa yang tak jemu-jemu, dukungan, motivasi, dan semangat luar biasa yang telah diberikan kepada Penulis, sungguh Penulis tidak dapat membalas semua jasa baik Bapak dan Ibu. Juga untuk adik-adik Penulis, Takbir Remalanda, Justitia Resalane, Odisa Rilasnusa, buat doanya dan keceriaan yang kalian berikan selama di rumah.

10. Sahabat baik Penulis, Vanesa Hesti Rahayu dan Elizabeth Yanuari. W, yang telah menjadi teman setia, yang memberi bantuan, dorongan dan semangat kepada Penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum UNS.
11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2005: Mbak Renti, Mbak Titi, Bang Ijal, Bang Rahman, Mas Dadi, Mba Vanny, Mas Pandu, Mas Daniel. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2006: Martha, Natalia, Widya, Dwi Budi, Hastin, Yurista. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2007: Adit, John, Banu, Richard, Ruth, Yosi, Shinta, Putri, Lili, Memei, Nares. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2008: Ardi, Julita, Ira, Vera, Alfin, Nico, Sherryto, Amel, Advent, David, Christian, Eli, Dina, Adit. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2009: Ina, Otik, Elfes, dkk. Terima kasih untuk kesempatan dapat mengenal rekan-rekan semua di fakultas hukum ini.
12. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNS yang telah menjadi keluarga bagi Penulis selama kuliah, juga yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk belajar berorganisasi dan melayani Tuhan di kampus.
13. Keluarga Pdt. Reynold, yang telah memberikan doa serta bimbingan Firman bagi Penulis, yang juga merupakan keluarga di dalam Tuhan.
14. Bapak dan Ibu Kos Cinta damai, yang telah memberi kesempatan bagi Penulis untuk tinggal di Kos Cinta Damai selama Penulis kuliah. Juga untuk Nining, Dyah, dan Julita Minaria Sinaga, yang menjadi saudara selama kos.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan baik moril maupun materiil, terima kasih untuk bantuannya. Tuhan memberkati.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu Penulis sangat menghargai setiap saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Harapan Penulis semoga penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, bagi perkembangan ilmu hukum di negeri ini, bagi masyarakat pada umumnya, juga bagi akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

YURISTI LAPRIMONI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana.....	12
a. Pengertian Hukum Acara Pidana	12
b. Tujuan Hukum Acara Pidana	14
c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	16
2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan.....	22
a. Pengertian Putusan Pengadilan	22

b. Bentuk Putusan Pengadilan.....	22
3. Tinjauan Tentang <i>Op tegenspraak</i>	24
a. Pengertian <i>Op tegenspraak</i>	24
b. Fungsi <i>Op tegenspraak</i>	25
c. Jenis <i>Op tegenspraak</i>	25
d. Upaya Hukum Terhadap Putusan <i>Op tegenspraak</i>	27
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan	28
a. Pengertian Penipuan	28
b. Jenis-Jenis Penipuan.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Ketidakmampuan Penuntut Umum Dalam Menghadirkan Terdakwa di Persidangan Dapat Menjadikan Alasan atau Tidak Bagi Hakim Untuk Menyidangkan Perkara Tanpa Hadirnya Terdakwa Namun Demikian Terdakwa Dianggap Hadir di Persidangan (<i>Op tegenspraak</i>).....	34
B. Implikasi Yuridis yang Dapat Timbul dengan Dikeluarkannya Putusan No. 32/Pid.B/2000/Pn.Srg Tentang Putusan <i>Op tegenspraak</i> Berupa Penuntutan Tidak Dapat Diterima.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran.....	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Surat Keterangan Penelitian dari Instansi Pengadilan Negeri Sragen;
- b. Penetapan No.32/Pen.Pid/2000/PN.Srg Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan perkara;
- c. Penetapan No.32/Pen.Pid/2000/PN.Srg Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
- d. Penetapan No.32/Pen.Pid/2000/PN.Srg Tentang Penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang;
- e. Surat Pengantar No.W9.Dz.HN.01.10-322 dari Pengadilan Negeri Sragen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Tentang Hari Sidang;
- f. Surat Panggilan Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Sragen;
- g. Berita Acara Penyampaian Surat Pemanggilan Terdakwa oleh Lurah Desa Kedawung;
- h. Surat Kecamatan Mondokan No.300/146-51/2005 Kepada Kejaksaan Negeri Sragen Tentang Pengembalian Surat Pemanggilan Terdakwa;
- i. Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.32/Pid.B/2000/PN. Srg;
- j. Petunjuk Ketua MA No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang;
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan "*prejudicieel geschiel*";
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan;
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- n. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum (*rechts staat*) seperti Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan, selain dimungkinkan penyelesaian masalah perdata (hukum privat) melalui jalur nonperadilan. Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Yang dimaksud disini adalah hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak boleh menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, karena hakim dianggap tahu hukumnya (asas *ius curia novit*).

Meskipun dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hampir tidak memberikan peluang diskresi bagi hakim, namun dalam praktiknya, banyak ditemukan bahwa undang-undang ternyata tidak lengkap atau tidak jelas meskipun dalam penjelasan undang-undang sudah disebutkan dengan jelas. Oleh karena itu, seorang hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rehtcsvinding*) karena setiap aturan hukum perlu dijelaskan dan memerlukan penafsiran sebelum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu (Johnny Ibrahim, 2006: 215). Pengertian penemuan hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo dalam Eddy O. S. Hiariej, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret (Eddy O. S. Hiariej, 2009:55-56). Menurut Doorn, tujuan-tujuan

yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Menurutnya, tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, keserasian misalnya, itu terlalu umum sehingga para pelaksana berpeluang mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai sekalian tujuan itu. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri (Sudijono Sastroatmodjo, 2005: 197-198).

Hakim dalam memeriksa perkara dapat menggunakan konstruksi hukum dalam rangka pembentukan hukum (*judge made law*) maupun interpretasi/penafsiran dalam rangka mencari dan menemukan hukumnya (*rehtcsvinding*). Hakim dapat menggunakan konstruksi hukum apabila ternyata hukumnya tidak ada atau dengan perkataan lain hukum Indonesia belum mengatur mengenai perkara tersebut, dan menggunakan interpretasi apabila aturan hukumnya tidak jelas, dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Meskipun demikian, praktik penemuan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu bertolak dari Peraturan perundang-undangan yang ada serta perlu mendapat perhatian serta pengawasan dari lembaga peradilan di atasnya, untuk menghindari terjadinya kesesatan hukum oleh hakim. Seperti juga dikemukakan oleh William Baude:

Because judges are human, that judgment may be wrong, either misinterpreting law or misapplying fact. Therefore, we have erected constitutional and statutory procedures designed to reduce that possibility of error and its costs, and have vested many judicial proceedings with rules of reconsideration and appellate review, so that more judges review a judgment before the Judicial Branch makes it final (William Baude, 2008:1808).

Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Suatu peraturan hukum konkret biasanya dilandasi oleh asas hukum. Oleh karena itu asas-asas umum hukum sebagaimana yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan atau doktrin memegang peranan yang cukup penting dalam penemuan hukum di

pengadilan (Eddy O. S. Hiariej, 2009:56). Hukum Indonesia khususnya dalam hal ini adalah hukum acara pidana memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum tersebut. Salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas bahwa hadirnya terdakwa di muka persidangan adalah suatu hal yang mutlak seperti yang diatur dalam Pasal 154 KUHAP. Terdakwa juga harus hadir pada saat putusan pengadilan dibacakan (Pasal 196 ayat (1) KUHAP). Hal senada juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain". KUHAP tidak memperkenankan terdakwa diperiksa oleh pengadilan secara *in absentia*, kecuali dalam perkara acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Selain dalam hal perkara cepat, hukum acara pidana dalam hal ini yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai konsekuensi terhadap terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan. Kecuali mengenai tindak pidana khusus telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, seperti tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955), tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang No. 15 Tahun 2002) dan tindak pidana terorisme (Undang-Undang No. 15 Tahun 2003).

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*). Dalam hal inilah diperlukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hukum. Mengenai hal ini, Peter Mahmud Marzuki menyatakan:

Adakalanya memang dalam praktik diketemukan suatu hal baru yang mungkin tidak didapatkan dalam suatu teori, tetapi hal itu sangat langka. Apabila hal itu terjadi perlu dikembalikan kepada teori dasarnya dan apabila teori dasarnya tidak dapat menjawab dapatlah dikatakan bahwa hal itu

merupakan sesuatu yang baru yang perlu ditelaah lebih jauh dan kemudian dapat dibuat teorinya (Peter Mahmud Marzuki, 2006:40).

Merupakan suatu hal yang perlu mendapat kajian teori hukum acara pidana suatu keadaan dimana terdakwa ternyata tidak dapat dihadirkan di muka persidangan karena terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di muka persidangan oleh Penuntut Umum. KUHAP menetapkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Siti Utari, 1984:119). Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan, demikian menurut ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP. Pasal 152 ayat (2) KUHAP menyebutkan: “Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan”, dan ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP menyebutkan, ”Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Ketidakmampuan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan tersebut pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sragen, yang dalam hal ini terdakwa kasus penipuan kemudian tidak dapat dihadirkan kembali di muka persidangan, hal tersebut terjadi karena adanya amukan massa pada saat persidangan sedang berlangsung, yang mengakibatkan terdakwa kemudian lari karena takut dipukuli massa, terdakwa pada saat itu tidak ditahan, dan sejak peristiwa tersebut terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya. Akibat peristiwa tersebut perkara ini menjadi sempat tertunda dan belum diputus hingga hampir 5 tahun yaitu terhitung sejak bulan Mei 2000 hingga bulan Maret 2005 dan menjadi permasalahan karena terus menerus ada dalam daftar laporan bulanan mengenai keadaan perkara pidana yang dilaporkan pihak Pengadilan Negeri ke pihak Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI (Surat Edaran Mahkamah Agung

No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara, suatu perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri atau pun Pengadilan Tinggi harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan, apabila ternyata perkara belum selesai dalam jangka waktu tersebut, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menyidangkan kembali kasus tersebut pada bulan Maret 2005 dengan menunjuk majelis hakim baru, sebab majelis hakim lama yang ditunjuk sebelumnya, telah dipindahtugaskan ke daerah lain, padahal perkara tersebut belum diputus, sehingga ditunjuk majelis hakim baru. Sampai persidangan dilaksanakan kembali, terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya, sehingga kemudian perkara tersebut diputus dengan terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*). Yang dijadikan pedoman dalam hal ini yaitu Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang, yaitu berbunyi sebagai berikut: “Jika tertuduh sekali telah menghadap, maka tidak mungkin lagi diberikan “*verstek*”. Prosedur *op tegenspraak* yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana tertuduh selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetap tidak hadir” dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschiel*”, dalam romawi kedua poin 4b menyebutkan: “Bahwa apabila tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan “*verstek*” melainkan Pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan “*op tegenspraak*”. Karena perkara tersebut belum sampai kepada tahap tuntutan pidana atau pemeriksaan belum selesai maka kemudian majelis hakim

menjatuhkan putusan penuntutan tidak dapat diterima karena tidak ada jaminan terdakwa akan dapat dihadapkan di persidangan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN OP TEGENSPRAAK BERUPA PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN KEMBALI DI PERSIDANGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg)”.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan terdakwa di persidangan dapat menjadikan alasan bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*)?**
- 2. Apakah implikasi yuridis yang dapat timbul dengan dikeluarkannya Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg tentang putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima?**

C. Tujuan Penelitian

- 1. Tujuan Obyektif:**
 - a. Untuk mengetahui ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan terdakwa di persidangan dapat menjadikan alasan atau tidak bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*).**
 - b. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang dapat timbul dengan dikeluarkannya Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg tentang putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima.**

2. Tujuan Subyektif:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, dalam hal penerapan KUHAP di dalam praktik.**
- b. Untuk menerapkan pengetahuan yang selama ini telah penulis peroleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**
- c. Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan untuk dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana.**
- b. Menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.**

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.**
- b. Merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di fakultas hukum UNS.**
- c. Diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa fakultas hukum serta praktisi hukum pada khususnya.**

E. Metode Penelitian

Paparan mengenai pengertian penelitian dalam penulisan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut, seperti halnya yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki:

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Adapun menurut Johnny Ibrahim, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut (Johnny Ibrahim, 2006:26).

Dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sampel atau analisis kualitatif maupun kuantitatif (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 89).

Metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. “Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya” (Johnny Ibrahim, 2006:57).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan:

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan sebagai berikut:

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). “Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dll” (Johnny Ibrahim, 2006: 392).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, melalui membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal penelitian, makalah, artikel internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deduksi (deduktif). Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan yang menjadi premis mayor penulis yaitu asas “pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa”, dan yang menjadi premis minor yaitu Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan kembali terdakwa di persidangan dalam Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg. Melalui kedua premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan tidak bisa memeriksa perkara karena ketidakhadiran terdakwa dalam perkara No.32/Pid.B/2000/PN.Srg.

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memaparkan mengenai tinjauan mengenai hukum acara pidana, tinjauan tentang putusan pengadilan, tinjauan tentang *op tegenspraak*, tinjauan tentang tindak pidana penipuan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pertama mengenai ketidakmampuan penuntut umum dalam menghadirkan terdakwa di persidangan dapat menjadikan alasan atau tidak bagi hakim untuk menyidangkan perkara tanpa hadirnya terdakwa namun

demikian terdakwa dianggap hadir dalam persidangan (*op tegenspraak*). Yang kedua, mengenai implikasi yuridis yang dapat timbul dengan dikeluarkannya Putusan No.32/Pid.B/2000/PN.Srg tentang putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga dapat pula disebut sebagai hukum pidana formil atau hukum acara pidana. “Hukum acara pidana disebut sebagai hukum formil, karena hanya dengan bentuk acara itu, maka isi hukum pidana bisa dilaksanakan. Itu artinya, bahwa hukum acara pidana adalah juga merupakan hukum pidana formil” (Nikolas Simanjuntak, 2009:23). Dan menurut Moch. Faisal Salam, “Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan ke muka sidang pengadilan dinamakan hukum formil” (Moch. Faisal Salam, 2001: 3).

Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau biasa disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). “KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyiataan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Diberi definisi dalam Pasal 1” (Andi Hamzah, 2002:4).

Lilik Mulyadi mengemukakan pengertian hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya.

Kebeneran materiil ini haruslah terdapat mulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan¹² tahap penuntutan, sampai tahap pemeriksaan perkara di p oleh hakim.

2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.

Aspek ini dimulai dari tahap pemeriksaan di persidangan sampai dengan pengucapan putusan (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).

3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Terhadap putusan belum berkekuatan hukum tetap, dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau jaksa/penuntut umum melakukan upaya hukum (Bab XVII dan Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP). Sedangkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh jaksa dan lembaga permasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh ketua pengadilan negeri, diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 283 KUHAP (Lilik Mulyadi, 2007:9-10).

Menurut Nikolas Simanjuntak, hukum acara pidana adalah penyelesaian persoalan pidana yang muncul di dalam kehidupan masyarakat umum (publik) sejak adanya dugaan terjadinya tindak pidana sampai dengan dilaksanakannya hukuman (eksekusi), yang dilakukan secara terangkai dan sistematis menurut peraturan hukum tertulis yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga dengan mengindahkan peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma (kebiasaan) yang berlaku di dalam masyarakat. Pelaksananya adalah aparat penegak hukum, yaitu pejabat umum yang ditentukan oleh Negara secara spesifik, seperti pejabat penyelidikan, penyidik, jaksa, hakim, pengacara (Nikolas Simanjuntak, 2009: 20).

Sedangkan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil berarti hukum yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan membela pelaksanaan hukum pidana materiil agar berjalan

dengan baik, atau dalam arti sebaliknya, bahwa segala aturan di dalam hukum pidana materiil hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika hukum acara pidana juga sekaligus bekerja dengan baik dan benar. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana mengatur agar hukum pidana materiil dipertahankan pelaksanaannya secara adil dan berkepastian oleh alat-alat Negara. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa menghukum atau membebaskan seseorang dari persangkaan atau tuduhan bersalah hanya bisa dilaksanakan dengan hukum acara pidana, dengan kata lain tiada instrumen lain untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari dugaan bersalah tanpa menempuh hukum acara pidana (Nikolas Simanjuntak, 2009: 24).

b. Tujuan Hukum Acara Pidana

Ahli hukum Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Bambang Purnomo dalam Nikolas Simanjuntak, mengemukakan 3 (tiga) tugas pokok hukum acara pidana dalam melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran hukum
- 2) Memberikan suatu putusan hakim
- 3) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim

Oleh Bambang Poernomo ditambahkan tugas yang keempat, yaitu mengadakan tindakan penuntutan secara benar, sehingga menjadi:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran hukum
- 2) Memberikan suatu putusan hakim
- 3) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim
- 4) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar

Oleh Nikolas Simanjuntak ditambahkan tugas yang kelima yakni memperjuangkan untuk melaksanakan perlindungan yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana itu, sehingga menjadi:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran hukum
- 2) Memberikan suatu putusan hakim
- 3) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim
- 4) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar

5) Memperjuangkan untuk melaksanakan perlindungan yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana itu (Nikolas simanjuntak, 2009: 26-27).

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2002: 9).

Adapun menurut Harun M. Husein, tujuan hukum acara pidana adalah, “berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dengan perantaraan aparat penegak hukumnya melalui hukum acara pidana dan berdasarkan atas kebenaran yang diperolehnya itu ditegakkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum secara konkrit dalam suatu perkara pidana” (Harun M. Husein, 1991:41).

Sedangkan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP dapat ditelaah pada huruf c konsiderans, yaitu sebagai berikut:

bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (M. Yahya Harahap, 2000:58-59).

Berdasarkan rumusan konsiderans huruf c KUHAP tersebut, dapat ditemukan tujuan yang terkandung dalam KUHAP adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;**
- b. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum;**
- c. Menegakkan hukum dan keadilan;**
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia;**
- e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum (Harun M. Husein, 1991:42-43).**

c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas hukum atau prinsip hukum menurut Sudikno Mertokusumo bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang

dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan oleh Sudikno, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (Sudikno Mertokusumo, 2005:34-35).

Menurut Satjipto Raharjo:

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Satjipto Raharjo, 2000:47).

Adapun menurut M. Yahya Harahap landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Sebab tanpa asas atau prinsip hukum, suatu perangkat Undang-Undang tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang efektif. Asas-asas atau prinsip hukum tersebut selain merupakan pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP, juga menjadi landasan bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000:35).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa asas-asas hukum acara pidana dapat ditelaah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan asas-asas umum hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

a) Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

b) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP.

c) Asas hak ingkar

Hak ingkar diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 157 KUHAP.

d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Hal ini secara eksplisit tercermin dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, penjelasan umum angka 3 huruf i KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

e) Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), Pasal 196 ayat (1) KUHAP, penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, khususnya terhadap perkara-perkara yang diajukan secara biasa (pid.B) dan singkat (pid.S). KUHAP tidak mengenal proses pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* terkecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Akan tetapi, asas ini justru diperlemah dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa".

f) Asas perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*equal before the law*)

Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP.

g) Asas bantuan hukum

Asas ini ditegaskan pada penjelasan umum angka 3 huruf f, Pasal 56, Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP dan Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

h) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 KUHAP. Hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata.

i) Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 KUHAP.

j) Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik, hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985).

k) Asas kepastian jangka waktu penahanan

Asas ini terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Apabila asas ini pada setiap pemeriksaan dilanggar, akan berakibat terdakwa harus “dilepaskan demi hukum” (Lilik Mulyadi, 2007:15-23).

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yaitu:

a) Asas legalitas

Asas legalitas disebut dengan tegas dalam konsideran KUHAP huruf a, yang berbunyi: “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, KUHAP mengakui asas legalitas sekaligus asas oportunitas, padahal kedua asas tersebut saling bertolak belakang.

b) Asas keseimbangan

Asas ini disebutkan dalam konsideran huruf c KUHAP yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

c) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan dan menjauhkan diri dari cara pemeriksaan yang “inkuisitur”, yaitu cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang, prinsip ini dulu digunakan dalam periode HIR.

d) Prinsip pembatasan penahanan

Pembatasan masa penahanan ini dimaksudkan untuk menegaskan nilai-nilai dasar hak asasi manusia untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

e) Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Asas ini ditegaskan dalam Bab XII KUHAP dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan dan ganti rugi akibat penggeledahan atau penyitaan.

- f) Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
- g) Asas unifikasi

Ditegaskan dalam konsideran huruf b KUHAP.

- h) Asas diferensiasi fungsional

Asas ini adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

- i) Prinsip saling koordinasi

KUHAP memuat ketentuan yang menghendaki suatu hubungan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum supaya terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang saling mengawasi, malahan bukan hanya meliputi antar instansi pejabat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim tapi diperluas sampai pejabat Lembaga Pemasyarakatan, penasihat hukum, dan keluarga tersangka/terdakwa.

- j) Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- k) Asas peradilan terbuka untuk umum.

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum. Terdapat pengecualian yaitu mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan dan yang terdakwa merupakan anak-anak (M. Yahya Harahap, 2000: 35-57).

2. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

“Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara” (Nikolas Simanjuntak, 2009: 223).

“Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya” (Andi Hamzah, 2002: 280).

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

b. Bentuk Putusan Pengadilan

Beberapa bentuk putusan pengadilan yaitu:

1) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Hal tersebut berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi permasalahan yaitu alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat dan meyakinkan. Putusan adalah bebas jika unsur objektifnya tidak terbukti.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Hal tersebut berarti perbuatan terbukti dari adanya alat-alat bukti yang sempurna, yang menjadi permasalahan adalah terdakwa terbukti berada dalam keadaan tidak cakap untuk dapat dihukum. Atau dapat dikatakan ada alasan pemaaf (*fais* 'd excuse) yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*) di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja atau lalai (Nikolas Simanjuntak, 2009: 225).

3) Putusan pidanaan

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: ”jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

4) Putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie* atau biasa disingkat N. O)

Bentuk putusan ini pada prinsipnya tidak ditemukan di dalam KUHAP, istilah putusan N. O (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) atau putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dapat ditemukan dalam praktik peradilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bagaimanapun juga praktik harus berdasarkan teori dan prinsip yang berlaku, dan bukan menyimpangi teori. Penerapan setiap ilmu harus berdasarkan teori yang melandasinya sebab apabila tidak demikian, penerapan itu akan gagal (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 38). Pengertian penuntutan sendiri menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan *non bis in idem* (Andi Hamzah, 2002:280).

Selain itu, dapat pula ditambahkan alasan putusan N. O yaitu apabila surat dakwaan batal demi hukum, dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan dibatalkan, dilanggarnya asas “bantuan hukum”, yaitu apabila ternyata terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan apabila dilanggarnya asas “pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa”, yang dimaksud yaitu terdakwa memang tidak dapat dihadirkan sejak awal persidangan atau dapat juga terdakwa pernah hadir di persidangan tetapi kemudian penuntut umum tidak dapat menghadirkan kembali di persidangan.

3. Tinjauan Tentang *Op tegenspraak*
 - a. Pengertian *Op tegenspraak*

Istilah *op tegenspraak* ini dapat ditemukan dalam praktik peradilan. *Op tegenspraak* adalah putusan terhadap terdakwa yang

tidak hadir namun dianggap hadir di persidangan. Terdakwa pernah hadir dalam sidang, namun kemudian tidak hadir karena sesuatu hal, tetapi bukan putusan verstek dan bukan *in absentia*. Putusan verstek dijatuhkan pada acara pemeriksaan cepat apabila terdakwa tidak hadir dan upaya hukumnya adalah verzet. Sedangkan persidangan *in absentia* menurut Dwiyanto Prihartono, ialah “mengadili tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Dalam hukum Indonesia peradilan *in absentia* dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi” (Dwiyanto Prihartono, 2003:13). Selain itu peradilan *in absentia* berlaku untuk tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang No. 15 Tahun 2002) dan tindak pidana terorisme (Undang-Undang No. 15 Tahun 2003).

Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 6 September 1979 menyebutkan:

Jika tertuduh sekali telah menghadap, maka tidak mungkin lagi diberikan “verstek”. Prosedur “*optegenspraak*” yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana tertuduh selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetap tidak hadir. Jadi putusan dalam perkara pidana itu bukan merupakan putusan “verstek” tetapi putusan “*optegenspraak*” (tertuduh dianggap hadir) (Kumpulan SEMA 1979-1985).

b. Fungsi *Op tegenspraak*

Fungsi putusan *op tegenspraak* yaitu untuk memutuskan tunggakan perkara-perkara lama yang terdakwa tidak ditemukan atau tidak dapat dihadirkan lagi dalam persidangan oleh Penuntut Umum dan perkaranya selalu muncul dalam setiap laporan bulanan, laporan 4 bulanan, dan laporan 6 bulanan. Padahal suatu perkara pidana harus sudah selesai dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara).

c. Jenis *Op tegenspraak*

Menurut makalah yang disampaikan Dwi Tomo dalam kelompok kerja (pokja) pidana militer pada tanggal 10 Desember 2009 di Bandung, putusan *op tegenspraak* yang dapat dijatuhkan sesuai tahap persidangan, yaitu jika:

1) Sudah sampai tahap tuntutan pidana

Jika ketidakhadiran terdakwa sudah sampai tahap tuntutan pidana, maka perkara diputus seperti biasa, yaitu terdapat 3 (tiga) kemungkinan apakah terdakwa akan diputus dipidana (dihukum), bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa". Ketentuan mengenai pemeriksaan selesai terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP dan mengenai pemeriksaan ditutup terdapat dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP.

a) Pemeriksaan selesai

Pasal 182 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 (KUHP) :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;**
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;**
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.**

Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

b) Pemeriksaan ditutup

Pasal 182 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981:

Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

2) Belum sampai tahap tuntutan pidana atau tidak pernah hadir

Jika ketidakhadiran terdakwa belum sampai tahap tuntutan pidana atau tidak pernah hadir, maka perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima. Penuntutan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan, sehingga penuntutan bukanlah tuntutan pidana. Menurut Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa Dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan: “Dalam hal perkara yang diajukan oleh jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima” (Vide Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Kr/1980 Tanggal 21 Januari 1981).

d. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Op tegenspraak*

Upaya hukum terhadap putusan *op tegenspraak* dapat dijabarkan berdasarkan jenis *op tegenspraak* tersebut, yaitu:

1) Apabila ketidakhadiran terdakwa sudah sampai tahap tuntutan pidana, maka perkara diputus seperti biasa, yaitu terdapat 3 (tiga) kemungkinan apakah terdakwa akan diputus dipidana (dihukum), bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal :

- a) Diputus dipidana, maka upaya hukumnya ialah banding dan bukan verzet, karena bukan merupakan putusan verstek.
- b) Putusan bebas, upaya hukum yang dapat diajukan ialah kasasi. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), dan menurut Pasal 244 KUHAP juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun, dalam praktik hukum, larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam Pasal 244 KUHAP tersebut berhasil diterobos melalui yurisprudensi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*) (HMA Kuffal, 2010:227). Hal ini lebih dipertegas lagi dengan sikap yang diambil oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri

Kehakiman No. M-14 PW 07.03 Tahun 1983 (M. Yahya Harahap, 1993: 1006).

- c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukumnya ialah kasasi. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP).**

- 2) Apabila ketidakhadiran terdakwa belum sampai tahap tuntutan pidana atau tidak pernah hadir, maka perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan). Terhadap putusan penuntutan tidak dapat diterima yang demikian, tidak dapat diajukan upaya hukum, namun penuntut umum dapat mengajukan lagi perkara tersebut apabila terdakwa sudah ditemukan.**

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 395. Judul asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Kata penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .**
- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.**

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, karena semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan Pasal 378 disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a yang disebut dalam praktik dikenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai *flessentrekerij* (penarikan botol-botol) yang oleh Prodjodikoro (1980:44) disebutnya dengan *ngemplang* (<http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>).

Menurut Cleiren dalam Andi Hamzah:

Delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting (Andi Hamzah, 2009: 112).

b. Jenis-Jenis Penipuan

1) Penipuan Dalam Bentuk Pokok

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Rumusan penipuan dari Pasal 378 KUHP terdiri dari:

a) Unsur-unsur objektif yang meliputi:

- (1) Perbuatan : menggerakkan,
- (2) yang digerakkan : orang,
- (3) perbuatan itu ditujukan pada:
 - (a) orang lain menyerahkan benda
 - (b) orang lain memberi hutang,
 - (c) orang lain menghapuskan piutang
- (4) cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
 - (a) memakai nama palsu,
 - (b) memakai tipu muslihat,
 - (c) memakai martabat palsu,

(d) memakai rangkaian kebohongan.

b) Unsur-unsur subjektif yang meliputi:

(1) maksud untuk menguntungkan:

(a) diri sendiri

(b) orang lain

(2) dengan melawan hak

2) Penipuan Ringan

Penipuan ringan (*lichte oplichting*) dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP. Faktor yang menyebabkan penipuan menjadi ringan adalah:

a) Benda objek bukan ternak, dan

b) Nilai benda objek tidak lebih dari Rp 250,00. Terhadap ternak walaupun nilainya kurang dari Rp. 250,00 tidak dapat menjadi penipuan ringan, sama seperti pada pencurian ringan, penggelapan ringan dan tindak pidana mengenai harta benda ringan lainnya, disebabkan nilainya yang khusus. Bagi masyarakat kita ternak dipandang mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

(1) Semua unsur penipuan Pasal 378 KUHP

(2) Unsur-unsur khusus, yakni:

(a) benda objek bukan ternak

(b) nilainya tidak lebih dari Rp 250,00 selain ada penipuan (*oplichting*) ringan, ada lagi penipuan (*bedrog*) ringan dalam hal jual beli yang dilakukan oleh penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 384 KUHP. Faktor yang menyebabkan diperingannya kejahatan Pasal 384 KUHP tersebut adalah juga terletak pada nilai objeknya kurang dari Rp 250,00 adalah berupa nilai batas tertinggi bagi kejahatan-kejahatan ringan.

3) Penipuan Dalam Hal Jual Beli

Dalam hal ini ada 2 bentuk penipuan, yakni yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP dan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam Pasal 383 KUHP dan 386 KUHP.

4) Penipuan Dengan Memalsu Nama Atau Tanda

Bentuk penipuan (*bedrog*) ini dirumuskan dalam Pasal 380 KUHP (<http://budi399.wordpress.com/2009/10/27/penipuan-bag-1/>).

B. Kerangka Pemikiran

Penjelasan Kerangka Pemikiran :

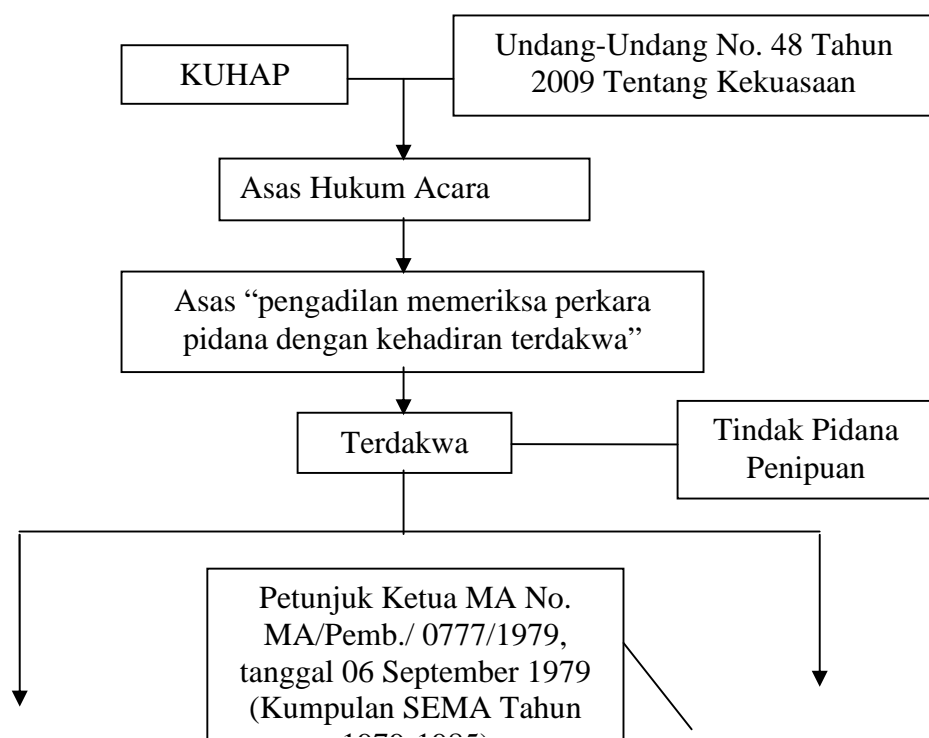
Ketentuan dan cara beracara hukum pidana Indonesia diatur di dalam KUHP. Hukum acara pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP memiliki asas-asas hukum. Asas-asas hukum acara pidana selain terdapat di dalam KUHP, terdapat juga dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana. Salah satu asas tersebut, yaitu “asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa”. KUHP tidak memperkenankan pengadilan memeriksa perkara tanpa hadirnya terdakwa kecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, oleh karena itu KUHP tidak mengatur ketentuan seandainya terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum. Namun ternyata dalam praktik peradilan ditemui kasus yang demikian.

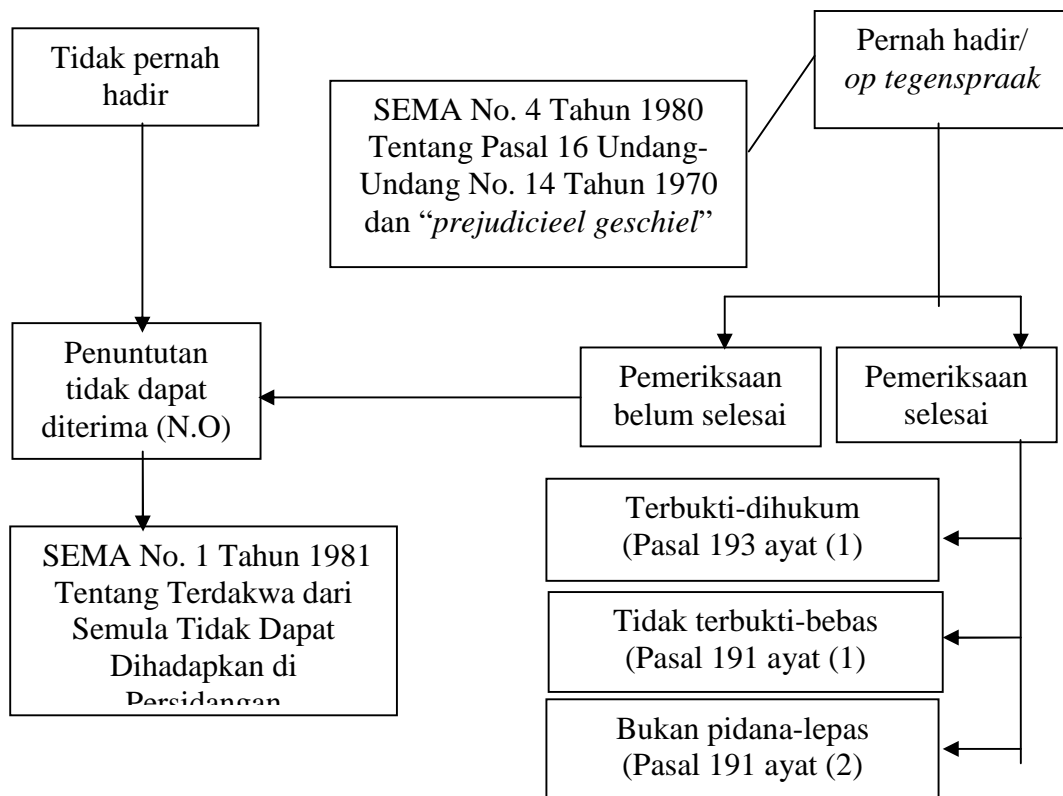
Pada dasarnya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya (asas *ius curia novit*), sehingga untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut hakim memerlukan interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam penelitian hukum ini penulis akan meneliti mengenai putusan yang dapat dijatuhkan hakim yang dalam hal ini terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian terdakwa dianggap hadir (*op tegenspraak*). Hakim dalam hal ini berpedoman kepada Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschief*”.

Karena perkara tersebut belum sampai kepada tahap tuntutan pidana atau pemeriksaan belum selesai maka kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan penuntutan tidak dapat diterima karena tidak ada jaminan terdakwa akan dapat dihadapkan di persidangan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan), dalam SEMA

tersebut juga disebutkan mengenai terdakwa yang dari semula tidak pernah hadir di persidangan putusan yang dapat dijatuhkan ialah putusan penuntutan tidak dapat diterima. Apabila terdakwa pernah hadir namun kemudian tidak hadir pada saat pemeriksaan telah selesai, kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan adalah putusan bebas (tidak terbukti), lepas (bukan pidana) atau dihukum (terbukti).

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:





Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketidakmampuan Penuntut Umum Dalam Menghadirkan Terdakwa di Persidangan Dapat Menjadikan Alasan atau Tidak Bagi Hakim Untuk Menyidangkan Perkara Tanpa Hadirnya Terdakwa Namun Demikian Terdakwa Dianggap Hadir di Persidangan (*Op Tegenspraak*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman dalam menegakkan hukum acara pidana di Indonesia. Di dalam penjelasan umum angka 3 KUHAP dijabarkan mengenai asas-asas hukum acara pidana, mengenai asas-asas tersebut pada dasarnya juga

telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satunya yaitu mengenai asas bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Penuntut Umum, sehingga pihak yang dibebani kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di persidangan adalah Penuntut Umum. Kewajiban Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, KUHAP menganggap bahwa setiap terdakwa selalu dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian, hal ini dapat diperhatikan melalui ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang tidak mengatur mengenai konsekuensi apabila terdakwa ternyata tidak dapat dihadapkan di persidangan, kecuali dalam hal tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Fakta yang kemudian terjadi tidak selalu sejalan dengan yang diamanatkan KUHAP, besar kemungkinan untuk terjadinya perkembangan kasus yang mungkin belum diatur di dalam KUHAP, sehingga diperlukan penafsiran dan konstruksi hukum oleh hakim untuk dapat menyelesaikannya, misal terdakwa yang tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan³⁴ 1. Jaksa Penuntut Umum karena melarikan diri pada waktu persidangan dan tidak dapat ditemukan lagi.

Fakta tersebut pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sragen, yaitu ketika Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan kembali terdakwa di persidangan pada perkara nomor 32/Pid.B/2000/PN.Srg. Kronologis kasusnya yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 April 2000, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen menyerahkan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Sragen, dengan nomor PDM-35/SRGN/EPO/0400, yaitu perkara dengan terdakwa atas nama Suharto. Ketua Pengadilan Negeri Sragen, I Gede Wayan Surya Sukanta, S. H, kemudian mengeluarkan Penetapan Nomor: 32/Pen.Pid/2000/PN.SRG, yaitu Penetapan mengenai penunjukan hakim majelis dan panitera oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menyidangkan dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1) jo Pasal

205 ayat (3) KUHAP). Penetapan tersebut menetapkan hakim majelis, yaitu Wayan Surya Sukanta, S. H sebagai hakim ketua, Sri Muryanto, S. H dan Bambang Mardjo, S. H sebagai hakim anggota, dan Bambang Setiawan, S. H sebagai panitera pengganti.

2. Persidangan pertama perkara dengan nomor register perkara pidana 32/Pid.B/2000/PN.Srg tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2000. Pada berita acara persidangan disebutkan bahwa terdakwa tidak berada dalam tahanan. Sidang yang pertama ini sampai kepada tahap pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim supaya sidang ditunda guna menyusun dan mempersiapkan jawaban eksepsi tersebut. Atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak keberatan dan menetapkan sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2000.
3. Pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2000, sidang kembali diselenggarakan. Terdakwa tidak berada dalam tahanan, dan acara persidangan pada hari itu ialah jawaban eksepsi Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa. Atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan jawaban eksepsi Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa Suharto, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, yang pada intinya yaitu menolak keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, dan memerintahkan agar sidang pemeriksaan perkara terdakwa Suharto tersebut dilanjutkan. Terhadap putusan sela tersebut, masing-masing pihak menyatakan menerima atas putusan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi. Penuntut umum pada hari itu menghadirkan 6 (enam) orang saksi. Penuntut Umum akan menghadirkan 5 (lima) orang saksi lagi pada sidang berikutnya dan untuk itu Penuntut Umum mohon supaya sidang

ditunda 5 (lima) hari lagi. Kemudian majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan ditunda pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2000. Pada sidang hari inilah terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi, sebab pada sidang berikutnya, yaitu tanggal 16 Mei 2000, terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Mei 2000 ini Hakim Pengadilan Negeri Sragen mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa yang semula tidak ditahan. Dalam hal menghadapi terdakwa yang menghambat kelancaran pemeriksaan sidang, umpamanya dengan cara tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim dapat pula mengeluarkan penetapan untuk menangkap atau menahan terdakwa. Penetapan tersebut dimaksudkan agar kehadiran terdakwa di persidangan berikutnya dapat terjamin dan perkara dapat diselesaikan secara cepat (Harun M. Husein, 1991:323). Hakim sebagai pejabat Negara, selain diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara, juga diberi wewenang melakukan penahanan dengan penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Siti Utari, 1984:120).

4. Sidang kembali diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2000. Pada berita acara persidangan disebutkan bahwa terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen dengan Penetapan No. 32/Pen.Pid/ 2000/PN.Srg tanggal 11 Mei 2000 sampai dengan tanggal 09 Juni 2000. Pada persidangan kali ini ketika Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan bahwa terdakwa belum bisa dihadapkan pada hari itu karena melarikan diri dan belum tertangkap, walaupun telah diupayakan lewat Kepolisian untuk menangkap terdakwa, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon sidang pada hari itu ditunda satu minggu untuk upaya

menghadirkan terdakwa. Sidang kemudian ditunda pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2000. Penangkapan terdakwa diupayakan melalui pihak Kepolisian, sebab Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penangkapan. Yang diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penangkapan hanya pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP).

5. Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2000 sidang kembali diselenggarakan. Pada berita acara persidangan hari itu disebutkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan Negara namun melarikan diri. Pada persidangan ini, terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum kembali memohon sidang pada hari itu ditunda untuk upaya menghadirkan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian ditetapkan bahwa sidang ditunda kemudian hari dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Kemudian Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera menghadapkan terdakwa apabila sudah tertangkap kembali. Artinya perkara ini ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan.
6. Akhirnya perkara ini ditunda kemudian hari tanpa batas waktu yang ditentukan. Kemudian Majelis Hakim yang menangani perkara ini dipindahtugaskan ke tempat lain, yaitu I Gede Surya Sukanta, S. H sebagai Ketua Majelis Hakim dipindahkan ke Pengadilan Negeri Semarang; Sri Muryanto, S. H sebagai anggota majelis dipindahkan ke Pengadilan Negeri Semarang; Bambang Marjo Susetyo, S. H sebagai anggota majelis dipindahkan ke Pengadilan Negeri Kediri, maka persidangan perkara ini menjadi tertunda selama hampir 5 tahun (terhitung sejak bulan Mei 2000 hingga bulan Maret 2005).

7. Untuk menyelesaikan perkara yang sempat tertunda tersebut, maka pada tanggal 01 Maret 2005, Ketua Pengadilan Negeri Sragen Tewernussa Steven, S. H melalui Penetapan No. 32/Pen.Pid.B/2000/ PN.Srg menunjuk majelis hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya penetapan ini yaitu:

- a) bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah ditunjuk majelis yang susunannya seperti tersebut dalam Penetapan No. 32/Pen.Pid/2000/PN/Srg tertanggal 25 April 2000,
- b) bahwa perkara tersebut telah ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan,
- c) bahwa majelis hakim yang lama telah dipindahtugaskan ke tempat yang baru sementara pemeriksaan perkara tersebut baru sampai tahap pemeriksaan saksi,
- d) bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu ditunjuk majelis hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Penetapan tersebut menetapkan Majelis Hakim baru yaitu menunjuk Dwi Tomo, S. H., M. Hum sebagai hakim ketua, Hari Tri Hardiyanto, S. H dan Daniel Pratu, S. H sebagai hakim anggota.

8. Kemudian Ketua Majelis Hakim, Dwi Tomo, S. H., M. Hum mengeluarkan Penetapan No. 32/Pen.Pid/2000/PN.Srg tertanggal 1 Maret 2005 yang isinya menetapkan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2005 serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Sragen untuk menghadapkan terdakwa Suharto atau kuasa hukumnya bernama RGA. Wishnuwira, S. H berikut saksi-saksi dengan membawa serta barang bukti yang berkaitan dengan perkaranya tersebut. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengeluarkan surat panggilan terdakwa tertanggal 3 Maret 2005 yang

memerintahkan terdakwa Suharto untuk menghadap Jaksa Ngadimin, S.H. Menurut Pasal 145 ayat (1) KUHAP, “pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir”. Surat panggilan terdakwa telah disampaikan di tempat kediaman terakhir terdakwa, yaitu Dk/Ds Kedawung, Rt. 08/03, Kecamatan Mondokan, Sragen. Namun terdakwa tidak ditemukan di tempat kediaman terakhirnya. Menurut Pasal 145 ayat (2) KUHAP, “apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya, atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir”. Karena pekerjaan terdakwa Suharto pada saat itu adalah sebagai kepala desa, sehingga surat panggilan disampaikan kepada pejabat desa lainnya, yaitu melalui Lurah Desa Kedawung, Ngadimin, dan melalui Camat Mondokan, B. Widyatmoko, S. Sos. Sebab menurut Pasal 227 ayat (3) KUHAP, apabila orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) KUHAP, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat. Dan menurut keterangan Lurah Desa Kedawung, Ngadimin, dalam berita acara penyampaian surat pemanggilan terdakwa tertanggal 9 Maret 2005, bahwa terdakwa Suharto beserta keluarga sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya.

9. Pada hari sidang yang ditentukan, Kamis, 10 Maret 2005, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan, namun sampai hari itu terdakwa belum dapat dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun telah diupayakan lewat Kepolisian untuk menangkap terdakwa dan telah diupayakan

pemanggilan kepada terdakwa melalui Lurah Desa Kedawung dan Camat Mondokan Kabupaten Sragen tertanggal 9 Maret 2005. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim supaya sidang pada hari itu ditunda untuk upaya menghadirkan terdakwa. Kemudian Majelis Hakim menetapkan sidang ditunda selama satu minggu dan akan diselenggarakan kembali pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2005.

10. Sidang kembali diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2005, namun terdakwa tetap belum dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melarikan diri dan belum berhasil ditangkap, sehingga sidang kembali ditunda selama satu minggu dan akan diselenggarakan kembali pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2005.
11. Sidang kembali diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2005, namun terdakwa tetap belum dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga sidang kembali ditunda selama satu minggu dan akan diselenggarakan kembali pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005.
12. Pada tanggal 31 Maret 2005, sidang kembali diselenggarakan, dan sampai pada hari itu terdakwa tetap belum dapat dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang hari itu Hakim Ketua Sidang tidak menunda hari sidang seperti sebelumnya, kemudian Hakim Ketua Sidang memberitahukan bahwa acara sidang pada hari itu adalah pembacaan putusan dalam perkara ini meskipun tanpa dihadiri terdakwa namun terdakwa dianggap hadir di persidangan (*op tegenspraak*) karena terdakwa telah melarikan diri dan tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan dapat dihadapkan kembali di persidangan. Atas pernyataan Hakim Ketua Sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan.

13. Selanjutnya Hakim Ketua Sidang membacakan Putusan No. 32/Pid.B/ 2000/PN.Srg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

----- Menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima ;

----- Membebankan biaya kepada Negara ;

Adapun yang menjadi dasar atau pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg adalah sebagai berikut :

- a) Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
- b) Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi sebanyak 11 (sebelas) orang namun demikian baru diperiksa 6 (enam) orang saksi, ternyata terdakwa telah melarikan diri sehingga terdakwa juga belum memberikan keterangannya dalam persidangan.**
- c) Menimbang bahwa tidak ada jaminan terdakwa akan dapat dihadapkan ke persidangan, maka penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Kr/1980 Tanggal 21 Januari 1981).**
- d) Menimbang bahwa penuntutan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.**
- e) Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.**

PEMBAHASAN :

Fakta persidangan yang diperoleh dari uraian tersebut menunjukkan tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan dapat dihadapkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan hukum sebagai berikut:

1. Menunda persidangan sampai terdakwa ditemukan;
2. Melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan *op tegenspraak* (terdakwa dianggap hadir) berupa penuntutan tidak dapat diterima.

Menunda persidangan sampai terdakwa ditemukan kiranya bukan pilihan hukum yang tepat sebab tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikuatkan dengan pengembalian surat pemanggilan terdakwa kepada pihak Kejaksaan oleh Camat Mondokan, B. Widyatmoko, S. Sos, yang di dalamnya memuat keterangan Lurah Desa Kedawung, Ngadimin, dalam berita acara penyampaian surat pemanggilan terdakwa tertanggal 09 Maret 2005, bahwa terdakwa Suharto beserta keluarga sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya. Dan penundaan perkara dalam batas waktu yang tidak ditentukan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi kepastian hukum (*tot nader*). Pertimbangan lain mengapa tidak tepat menunda perkara ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, yaitu:

- a. Suatu perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, dan apabila ternyata perkara belum dapat selesai dalam jangka waktu tersebut, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara. Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tersebut dapat dimengerti sebagai salah satu cara mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Pihak Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri ke pihak Pengadilan Tinggi, seperti yang dinyatakan dalam SEMA No. 5

Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yaitu berupa pengiriman laporan berkala bulanan keadaan perkara pidana kepada pihak Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. Perkara ini sempat tertunda hingga hampir 5 tahun, yaitu terhitung sejak bulan Mei 2000 hingga bulan Maret 2005, sehingga perkara tersebut terus-menerus ada dalam setiap laporan bulanan mengenai keadaan perkara pidana hingga hampir 5 tahun.

Majelis hakim memilih untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya terdakwa namun demikian terdakwa dianggap hadir (*op tegenspraak*) dengan memberi kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk upaya menghadirkan terdakwa, dan kemudian menjatuhkan putusan *op tegenspraak* (terdakwa dianggap hadir di persidangan). Menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa sesungguhnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dalam hal ini putusan *op tegenspraak* dapat diartikan sebagai pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Untuk segala sesuatunya selalu ada pengecualian, juga dalam hal mengenai asas kehadiran terdakwa di persidangan. Ada adagium yang menyatakan, *judicis est in pronuntiando sequi regulam exceptione non probata*, yang artinya “dalam membuat keputusan, hakim wajib mengikuti peraturan, lain halnya jika ada kekecualian”. Selain itu, terdapat asas “*in dubio pro reo*”, yang artinya jika terdapat keraguan, kita harus memilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa.

Terdakwa memang tidak hadir di persidangan namun dianggap hadir. Yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan ini yaitu Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang, yaitu berbunyi sebagai berikut: “Jika tertuduh sekali telah menghadap, maka tidak mungkin lagi diberikan “*verstek*”. Prosedur *op tegenspraak* yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana tertuduh selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetap tidak hadir”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschief*”. Seperti yang sudah Penulis kemukakan, bahwa putusan *op tegenspraak* dapat digolongkan menjadi

2 jenis. Dalam hal ini, karena ketidakhadiran terdakwa belum sampai tahap tuntutan pidana, yaitu pada saat itu masih pada tahap pemeriksaan saksi-saksi, sehingga perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima (Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan). Penjatuhan putusan *op tegenspraak* ini juga dengan memperhatikan peraturan hukum lainnya seperti yang sudah Penulis kemukakan di atas, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan, dan keadilan itu biasanya tercermin melalui putusan yang dijatuhkan. Seperti juga dalam setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikianlah hukum selalu bercita-cita untuk mewujudkan keadilan. Sebagai negara hukum, maka untuk mewujudkan keadilan tersebut, seorang hakim harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Indonesia, kecuali apabila hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam sistem Perundang-undangan dikenal adanya hierarki (tingkatan urutan). Adapun yang menjadi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan tata urutan perundangan tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan KUHAP adalah sebagai Undang-Undang dan berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perundang-undangan suatu negara merupakan sistem yang tidak menghendaki atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Dikenal adagium *lex superior derogate legi inferiori*, yang maksudnya dalam mengatur hal yang sama, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.

KUHAP sebagai Undang-Undang dapat dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntun proses dan perilaku dalam masyarakat.

Sebenarnya ada juga adat, kebiasaan dan berbagai norma nonhukum lainnya yang juga berfungsi memberikan tuntunan seperti itu. Meski demikian, undang-undang memiliki kelebihan di atas norma lain itu, kelebihan itu disebut legalitas dan legitimasi karena undang-undang adalah dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai satu-satunya badan yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang. Undang-undang dianggap sebagai satu-satunya akses masuk saat orang membicarakan tentang hukum dan negara hukum. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan betapa kompleksnya masalah dan bekerjanya hukum. Hukum tidak selalu sejelas, segampang, dan sesederhana seperti yang dibayangkan orang, kendati dikatakan, hukumnya sudah jelas (Satjipto Rahardjo, 2008: 95-96).

Undang-undang memiliki aspek statis dan dinamik. Dari aspek dinamik, undang-undang memiliki dinamikanya sendiri yang tidak selalu bisa dibayangkan dan diantisipasi oleh pembuatnya. Karena ketika hukum sudah berada dalam masyarakat, yang bersinggungan langsung dengan hukum itu bukan lagi pembuat hukum, tetapi interaksi antara hukum dan kondisi nyata yang tersedia (Satjipto Rahardjo, 2008: 97). Lagi pula kenyataan yang ada di kehidupan praktik, acap kali bukanlah kenyataan yang tertera di dalam Undang-Undang. Tidak jarang dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus menghadapi kenyataan dan keadaan yang dalam hal ini pertimbangan benar atau salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan yang menghendaki keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata (Sudijono Sastroatmodjo, 2005: 198).

Menurut KUHP, tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana biasa, sehingga untuknya berlaku ketentuan yang ada dalam KUHP, termasuk ketentuan bahwa terdakwa harus hadir di persidangan. Namun bagaimana halnya jika terdakwa ternyata tidak dapat dihadirkan di persidangan, KUHP tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena terdakwa lari pada saat persidangan karena takut akan dipukuli oleh massa. Massa dalam hal ini akan melakukan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*). Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan perbuatan pidana. Kemudian yang menjadi fokus adalah akibat dari peristiwa itu dan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk perkara ini hakim menjatuhkan putusan *op tegenspraak*, yaitu berpedoman kepada Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu

Kali di Persidangan lalu Menghilang dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschieel*”.

Hal tersebut jika dinilai menurut tata urutan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan KUHAP jelas berada jauh di atas SEMA, namun yang menjadi fokus disini bukanlah mana yang lebih unggul, tetapi peraturan mana yang lebih dapat memberikan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Jika KUHAP kemudian tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi, apakah hanya akan berpedoman kepada KUHAP, tanpa memperhatikan peraturan hukum di bawahnya yang mungkin justru memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. SEMA merupakan petunjuk dari pihak Mahkamah Agung untuk menyelesaikan hal-hal dalam praktik peradilan, yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Meski SEMA tidak berada dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, namun jika SEMA dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, apakah hal tersebut dapat menjadikan alasan untuk tidak menggunakannya. Dalam hal ini yaitu hanya untuk hal-hal yang belum diatur di dalam KUHAP.

Lain halnya jika dalam keadaan normal, dalam artian tidak terjadi sesuatu yang menghambat kehadiran terdakwa, yaitu apabila bukanlah suatu hal yang sukar untuk menghadirkan terdakwa di persidangan, maka dalam hal ini yang dijadikan pedoman haruslah KUHAP. Namun, jika terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, apakah akan tetap memaksakan untuk menggunakan KUHAP, padahal dilakukan upaya paksa seperti apapun terdakwa tetap tidak akan dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam hal ini, jika tetap berpedoman kepada KUHAP, perkara tidak akan ditemukan penyelesaiannya, persidangan akan tertunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sebab sidang akan ditunda hingga terdakwa dapat dihadirkan di persidangan, padahal tidak diketahui kapan terdakwa akan dapat dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Penulis keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima atas perkara tersebut sudah tepat bahkan bersifat progresif. Putusan *op tegenspraak* kiranya bukanlah pelanggaran terhadap asas “pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa”, melainkan pengecualian terhadap asas tersebut, karena terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun terhadap terdakwa telah dilakukan panggilan secara sah oleh pihak Kejaksaan

dan upaya untuk menangkap terdakwa melalui lembaga Kepolisian untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo dengan aspek dinamis dari undang-undang, yang menempatkan hakim mengambil tindakan atas persinggungan hukum dengan permasalahan di masyarakat.

B. Implikasi Yuridis yang Dapat Timbul Dengan Dikeluarkannya Putusan No.32/Pid.B/2000/Pn.Srg Tentang Putusan *Op Tegenspraak* Berupa Penuntutan Tidak Dapat Diterima

Mengenai implikasi yuridis putusan *op tegenspraak*, Penulis merasa perlu untuk menegaskan kembali mengenai jenis putusan *op tegenspraak* yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Jenis putusan *op tegenspraak* ada 2 dan dapat dibedakan menurut tahap persidangan, yaitu:

1. Sudah Sampai Tahap Tuntutan Pidana

Jika ketidakhadiran terdakwa sudah sampai tahap tuntutan pidana, maka perkara dapat diputus seperti biasa, yaitu terdapat 3 (tiga) kemungkinan apakah terdakwa akan diputus dipidana (dihukum), bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *op tegenspraak* ini, yaitu:

- a. Diputus dipidana, maka upaya hukumnya ialah banding dan bukan verzet, karena bukan merupakan putusan verstek.**
- b. Putusan bebas, upaya hukum yang dapat diajukan ialah kasasi. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), dan menurut Pasal 244 KUHAP juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun, dalam praktik hukum, larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam Pasal 244 KUHAP tersebut berhasil diterobos melalui yurisprudensi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*) (HMA Kuffal,**

2010:227). Hal ini lebih dipertegas lagi dengan sikap yang diambil oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14 PW 07.03 Tahun 1983 (M. Yahya Harahap, 1993: 1006).

- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukumnya ialah kasasi. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP).

2. Belum Sampai Tahap Tuntutan Pidana atau Tidak Pernah Hadir.

Apabila ketidakhadiran terdakwa belum sampai tahap tuntutan pidana atau tidak pernah hadir, maka perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima. Terhadap putusan penuntutan tidak dapat diterima yang demikian, yaitu karena terdakwa tidak dapat dihadirkan, tidak dapat diajukan upaya hukum, namun Penuntut Umum dapat mengajukan lagi perkara tersebut apabila terdakwa sudah ditemukan. Putusan pengadilan yang Penulis bahas dalam penelitian ini belum sampai tahap tuntutan pidana dan terdakwa diputus penuntutan tidak dapat diterima sehingga terbuka kemungkinan perkara ini dapat dibuka dan disidangkan kembali sewaktu-waktu dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa sudah dapat ditemukan dan sudah dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi implikasi yuridis dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg yaitu:

- a. Putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan, tidak dapat diajukan upaya hukum, namun Penuntut Umum sewaktu-waktu dapat mengajukan lagi perkara ini dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa sudah ditemukan dan dapat dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- b. KUHAP tidak mengatur apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus pidana dimana terdakwa tidak bisa

dihadirkan kembali di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah oleh Penuntut Umum dan belum sampai tahap tuntutan pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschiel*”, SEMA No. 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan, SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dan SEMA No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka perkara harus diputus secara *op tegenspraak* dan penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab persidangan belum sampai tahap tuntutan pidana.

- c. Dinilai dari unsur kemanfaatan hukum, putusan *op tegenspraak* memberikan penyelesaian untuk tunggakan-tunggakan perkara (lebih dari 6 bulan) yang terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan. Jika dinilai dari unsur kepastian hukum (berpedoman pada KUHAP), perkara tersebut sebenarnya tidak akan dapat disidangkan sampai terdakwa dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab demikianlah yang diamanatkan oleh KUHAP. Namun, menunda suatu perkara tanpa batas waktu yang ditentukan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dari unsur kepastian hukum. Jika dinilai dari unsur keadilan, meskipun perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima, namun suatu saat perkara ini dapat dibuka kembali dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa telah ditemukan, dan pada saat itu dapat diputuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis kaji, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam mengeluarkan Putusan No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg tentang putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima atas nama terdakwa Suharto adalah karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan terdakwa di persidangan karena terdakwa yang melarikan diri dan belum berhasil ditemukan, meskipun telah dilakukan panggilan secara sah terhadap terdakwa. Keadaan ini membuat perkara tersebut menjadi sempat tertunda dan belum diputus hingga kurun waktu hampir 5 tahun, sehingga kemudian Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dan membebankan biaya kepada Negara. Dasar penjatuhan putusan *op tegenspraak* yaitu berpedoman kepada Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschiel*”. Putusan *op tegenspraak* berfungsi untuk memutus tunggakan perkara-perkara lama yang terdakwa tidak ditemukan atau tidak dapat dihadirkan lagi di persidangan oleh Penuntut Umum. Dan karena ketidakhadiran terdakwa pada saat itu belum sampai tahap tuntutan pidana atau tahap pemeriksaan belum selesai, yaitu pada saat itu masih pada tahap pemeriksaan saksi-saksi, sehingga perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima (Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di

Persidangan). Menurut Penulis, langkah mengeluarkan putusan tersebut sudah tepat, bahkan bersifat progresif, mengingat tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan dapat dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menunda perkara tanpa batas waktu yang ditentukan sampai terdakwa ditemukan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi kepastian hukum dan kurang tepat sebab terdapat peraturan SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara, yang mengharuskan suatu penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dan ketentuan untuk mengirim laporan berkala bulanan keadaan perkara pidana kepada pihak Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI (SEMA No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

2. Implikasi yuridis yang timbul dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 32/Pid.B/2000/PN.Srg yaitu sebagai berikut:

- a. **Putusan *op tegenspraak* berupa penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan, tidak dapat diajukan upaya hukum, namun Penuntut Umum sewaktu-waktu dapat mengajukan lagi perkara ini dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa sudah ditemukan dan dapat dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum.**
- b. **KUHAP tidak mengatur apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus pidana dimana terdakwa tidak bisa dihadirkan kembali di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah oleh Penuntut Umum dan belum sampai tahap tuntutan pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979, tanggal 06 September 1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14**

Tahun 1970 dan “*prejudicieel geschief*”, SEMA No. 1 Tahun 1981 Tanggal 22 Januari 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan, SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dan SEMA No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka perkara harus diputus secara *op tegenspraak* dan penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab persidangan belum sampai tahap tuntutan pidana.

- c. Putusan *op tegenspraak* ini memberikan unsur kemanfaatan hukum, yaitu penyelesaian untuk tunggakan-tunggakan perkara (lebih dari 6 bulan) yang terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan. Jika dinilai dari unsur kepastian hukum, perkara tersebut sebenarnya tidak akan dapat disidangkan sampai terdakwa dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab demikianlah yang diamanatkan oleh KUHAP. Namun, menunda suatu perkara tanpa batas waktu yang ditentukan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi kepastian hukum. Jika dinilai dari unsur keadilan, meskipun perkara diputus penuntutan tidak dapat diterima, namun suatu saat perkara ini dapat dibuka kembali dengan nomor register perkara baru apabila terdakwa telah ditemukan, dan pada saat itu dapat diputuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pelatihan hukum atau seminar-seminar hukum bagi kalangan praktisi, khususnya hakim, yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dalam hal ini yaitu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemahiran hakim dalam menentukan kebijakan yang dapat

diambil oleh seorang hakim menghadapi situasi terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Merujuk kepada fakta yang terjadi bahwa ada kemungkinan terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun telah dilakukan upaya panggilan secara sah. Maka menurut Penulis, dalam rancangan KUHAP baru yang akan dibentuk, perlu mengatur mengenai pengecualian terhadap asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa, ketentuan mengenai konsekuensi apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan kembali di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga mengenai tindakan yang dapat diambil oleh seorang hakim apabila ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan kembali terdakwa di persidangan. Meskipun hal tersebut telah diatur dalam SEMA, namun akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum apabila diatur oleh KUHAP, yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan dan pedoman utama dalam menegakkan hukum acara pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiyanto. *Kejahatan Penipuan*. <http://budi399.wordpress.com/2009/10/27/penipuan-bag-1/>>[20 April 2010 pukul 13.15].

Dwi Tomo. 2009. “Op tegenspraak dan Minutasi”. *Makalah*. Disampaikan pada kelompok kerja (pokja) pidana militer, pada tanggal 10 Desember 2009 di Bandung.

Dwiyanto Prihartono. 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa*. Yogyakarta: Community Development of Bethesda Hospital.

- Eddy O. S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- HMA, Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Penipuan. <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>>[20 April 2010 pukul 13.00].
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979 (Kumpulan SEMA Tahun 1979-1985) Tentang Penyelesaian Perkara Pidana yang Tertuduhnya Setelah Hadir Satu Kali di Persidangan lalu Menghilang.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Siti Utari, dkk. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudijono Sastroatmodjo. 2005. "Konfigurasi Hukum Progresif". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 2. eprints.ums.ac.id/312/1/3._SUJIONO.pdf.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1981 Tentang Terdakwa dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan "*prejudicieel geschief*".

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1992 Tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

William Baude. 2008. "The Judgement Power". *The Georgetown Law Journal*. Vol. 96, No. 6.